

BAB III
DINAMIKA POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DI ASIA
TENGGARA

A. Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Berbicara mengenai politik luar negeri Indonesia, maka kita akan berbicara tentang kepentingan nasional, kerjasama bilateral maupun multilateral, dan tujuan dalam menentukan sebuah kebijakan tertentu. Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton yang di sebutkan dalam buku politik luar negeri Indonesia menggalang kerjasama selatan dan selatan yaitu: ” *Foreign Policy is strategy or planned course of action developed by the decision makers of a state vis other state or international entities aimed as achieving specific goals defined intern of national interest*”²⁷

Jika melihat dari definisi di atas, maka dapat kita jabarkan bahwasannya sebuah politik luar negeri merupakan hal terencana yang di tentukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan di sebuah negara untuk mencapai kepentingan nasional. Dalam bab ini penulis akan memberikan suatu gambaran yang menjelaskan bahwa hal yang mendasar dalam keaktifan Indonesia dalam proses perdamaian konflik Mindanao yaitu arah dari kepentingan politik luar negeri Indonesia itu sendiri yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan nasional.

²⁷Djumadi. (1994). *Politik Luar Negeri Indonesia Menggalang Kerjasama Selatan Dan Selatan*. Yogyakarta : Aditya Media, hal 14

Pembahasan kali ini akan lebih keterkaitan dengan peran Indonesia di Mindanao tanpa disandari oleh teori-teori secara eksplisit.

1. Indonesia Era Soekarno

Mengenal politik luar negeri Indonesia, maka dimulai pada era Soekarno. Politik luar negeri Indonesia tidak hanya diartikan bagaimana Indonesia menentukan hubungan luar negeri dengan negara atau aliansi tertentu, akan tetapi politik luar negeri Indonesia dapat diartikan sabagai bentuk atau sikap untuk memperjuangkan kehidupan bangsa dan membangun kepentingan nasional melalui hubungan luar negeri. Maka dari itu politik luar negeri Indonesia bergerak sesuai dengan landasan UUD dan Pancasila sebagai falsafah dan pedoman bangsa Indonesia. Pasal UUD 1945 yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara serta memberikan gambaran secara garis besar dalam kebijakan luar negeri Indonesia.²⁸ Sedangkan Pancasila merupakan dasar negara yang mengikat seluruh kehidupan nasional bangsa Indonesia dalam melakukan aktivitas politik negara agar selalu sesuai kehidupan nasional sehingga menjadikan Pancasila ini sangat berpengaruh dan menjiwai dalam ranah politik luar negeri RI.²⁹

Dari masa ke masa Indonesia selalu memperhatikan serta menselaraskan politik luar negerinya dengan perkembangan isu internasional karena dalam menjalankan arah gerak politik luar negeri, Indonesia selalu menghadapi gejolak dunia internasional yang berbeda. Seperti pada saat Indonesia memutuskan untuk

²⁸Ganewati Wuryandari, D. M. (2008). *Politik Luar Negeri Indonesia Di Tengah Pusaran Politik Domestik*. Jakarta: Pusat Penerbitan Politik-LIPI, hal 28

²⁹*Politik Luar Negeri Republik Indonesia*. (1987). Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, hal 7

keluar dari keanggotaan PBB dan juga Soekarno dalam pidatonya menyatakan konfrontasi terhadap Malaysia karena adanya hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak.

Selain mengacu pada UUD dan Pancasila, kondisi dalam negeri baik secara politik, ekonomi, atau yang lainnya menjadi faktor penting dalam menentukan kebijakan luar negeri Indonesia karena sejatinya politik luar negeri ditentukan untuk mengadopsi kepentingan negara melalui hubungan luar negeri dengan negara lain baik secara bilateral maupun multilateral.

Pada era Soekarno Indonesia dihadapkan pada kondisi yang sangat genting baik secara stabilitas politik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam negeri Indonesia dihadapkan pada animo masyarakat yang ingin merdeka dan mengakhiri penjajahan. Kemudian setelah merdeka Indonesia pun sangat sadar tentang pentingnya pengakuan atau dukungan internasional bagi kemerdekaan Indonesia. Dalam bukunya yang berjudul politik luar negeri Indonesia, Michael Leifer mengatakan bahwa pasca kemerdekaan pengakuan internasional menjadi hal yang penting dalam era Soekarno guna mencegah kembalinya kolonial. Maka dari itu, politik luar negeri Indonesia di era Soekarno lebih merujuk untuk mencari dukungan atau pengakuan dari dunia Internasional karena selain mencegah kolonial, salah satu yang menjadi indikator sebuah negara dikatakan merdeka yaitu adanya pengakuan dari negara-negara lain.

Prinsip politik luar negeri Indonesia di mulai oleh bung Hatta sebagai inisiator politik luar negeri Indonesia Bebas Aktif. Arah politik luar negeri bebas

aktif ini didasari oleh kondisi dunia internasional pada saat itu. Selain itu, penentuan sikap ini berdasarkan pada UUD 1945 yang mana dalam alinea IV mukadimah disebutkan bahwa Indonesia harus ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.³⁰ Dalam dokumen badan penelitian dan pengembangan Departemen Luar Negeri RI dijelaskan tentang politik luar negeri Indonesia bebas aktif diartikan sebagai politik luar negeri yang diabdikan pada kepentingan nasional. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa Indonesia sangat memperhatikan kepentingan nasional yang kemudian akan di adopsi pada praktik politik luar negeri tanpa mengikat diri kepada salah satu blok di dunia internasional. Sehubungan dengan hal demikian, Indonesia ingin menjadi negara yang mandiri dan menjauhkan adanya intervensi yang akan mengakibatkan kerusakan terhadap kedaulatan dan keutuhan bangsa.

Sejak era Soekarno, secara politik luar negeri Indonesia memiliki ambisi untuk menjadi pemimpin dunia khususnya di wilayah Asia Tenggara. Bahkan presiden Soekarno menganggap bahwa Indonesia bisa menjadi pemimpin di Asia dan Afrika, terlepas diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika I di Bandung pada tahun 1955. Sikap politik luar negeri Indonesia selama era Soekarno, Indonesia lebih dekat dengan RRC dan memiliki hubungan yang kurang baik dengan Malaysia dan juga Soekarno pernah melakukan kritik terhadap PBB bahkan Indonesia mengundurkan diri dari keanggotaan PBB. Arah kebijakan politik luar negeri Soekarno lebih memprioritaskan dalam hal politik. Padahal

³⁰lebih lengkapnya bisa dilihat pada dokumen Badan Penelitian dan pengembangan Departemen Luar Negeri RI

pada jangka waktu 1962 kondisi perekonomian Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis. Menurut Michael Leifer, memberikan prioritas pada pembangunan ekonomi bukan hal yang memerlukan bakat politik Soekarno dan hal tersebut dianggap akan menyebabkan ketergantungan ekonomi yang akan mengharuskan Indonesia hidup berdampingan dengan Oldefos³¹ yang sangat ditentang oleh Soekarno.

2. Indonesia Era Soeharto

Indonesia pada rezim Soeharto terkenal dengan nama era orde baru. Di mana rezim ini merupakan rezim yang paling panjang di Indonesia dengan masa kepemimpinan selama 32 tahun dari tahun 1966 – 1998. Berbicara pemerintahan orde baru yang dipimpin oleh Soeharto, banyak sekali fenomena besar yang terjadi sehingga banyak hal menarik untuk sebuah pembahasan meskipun rezim ini sudah terjadi lebih dari 19 tahun yang lalu. Akan banyak hal menarik tentang rezim ini, baik tentang arah politik luar negeri Indonesia sampai kepada dinamika politik dalam negeri yang mempengaruhi pada kebijakan politik luar negeri tersebut.

Pada awal masa kepemimpinan, Soeharto sudah dihadapkan pada situasi yang kompleks, mengingat merosotnya ekonomi domestik yang ditinggalkan oleh pendahulunya, Soekarno. Awal masa kepemimpinan Soeharto ditandai dengan adanya pengalihan fokus dari pembangunan bangsa menjadi pembangunan

³¹Konsep Oldefos tidak terlalu jelas definisinya. Namun demikian, Leo Suyadinata dengan mengutip dari bukunya George Modelski menyatakan bahwa mealuli proses eliminasi kita sampai pada suatu kesimpulan bahwa mereka adalah elemen-elemen negara kapitalis Amerika Serikat, Eropa Barat, dan termasuk Australia yang “non progresif” (lihat hal 39)

ekonomi dan ingin mempertahankan hubungan luar negeri yang bersahabat dengan pihak Barat. Orientasi dari pembangunan ekonomi dalam negeri secara signifikan akan mempengaruhi pada sikap politik luar negeri RI. Sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Bambang Cipto, M.A Soeharto memiliki pandangan politik luar negeri yang tidak terlepas dari pertimbangan dalam negeri.³² Yang kemudian hal ini menjadi perhatian serius dalam tatanan politik luar negeri Indonesia yang diharapkan dapat membantu keseimbangan dalam negeri. Berhubungan dengan hal demikian Soeharto pun mempromosikan kebijakan pintu terbuka untuk menggalang bantuan asing untuk menambal kondisi ekonomi domestik.

Secara prinsip, Soeharto tidak merubah sifat politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, akan tetapi Soeharto secara tegas akan melakukan pemurnian dalam pelaksanaan politik bebas aktif. Seruan awal tentang arah politik luar negeri Soeharto di umumkan dalam pidatonya di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada tahun 1966, dari pidato tersebut memiliki dua poin penting tentang fokus utama yaitu stabilitas politik keamanan dan pembangunan ekonomi.³³ Dan kemudian pada TAP MPR No. IV/MPR/2973 dan TAP MPR No. IV/MPR/1978 memepertegas lagi bahwa pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif harus sesuai dan diabsikan keapda kepentingan nasional, terutama untuk

³²Bambang Cipto. (2007) *Hubungan Internasional Di Asia Tenggara : Teropong Terhadap Dinamika. Realitas, Dan Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 89.

³³Ganewati Wuryandari, D. M, op.cit., hal 115.

kepentingan pembangunan di segala bidang.³⁴ Soeharto sangat menyadari bahwa untuk membangun pertumbuhan ekonomi nasional perlu diiringi dengan stabilitas politik domestik dan perdamaian eksternal. Maka dari itu Soeharto ingin membebaskan Indonesia dari citra buruk di dunia internasional yang di klaim sebagai akibat dari kepemimpinan Soekarno yang agresif dan revolusioner. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya konfrontasi yang terjadi baik dengan negara lain ataupun organisasi/lembaga internasional.

Dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, terlihat perbedaan dari segi tujuan serta gaya Soeharto dengan Soekarno dalam menangani suatu persoalan internasional. Masa kepemimpinan Soeharto, pemerintah lebih berhati-hati dan juga mengedepankan ambisi kawasan. Sedangkan Soekarno lebih cenderung menggunakan gaya desakan meskipun Soekarno tidak melupakan diplomasi sebagai salah satu gaya pelaksanaan politik luar negeri.

Hal tersebut kemudian diperlihatkan oleh Soeharto pada tahun 1966 Indonesia kembali bergabung menjadi salah satu negara anggota PBB. Kemudian untuk poin stabilitas politik keamanan yang dijadikan salah satu fokus utama dalam politik Indonesia masa orde baru dimana diasumsikan bahwa pembangunan ekonomi yang stabil tidak akan dicapai tanpa adanya politik yang aman baik secara domestik ataupun internasional. Bahkan Indonesia menganggap bahwa keamanan regional merupakan hal penting yang perlu dibangun, maka dari itu pada era Soeharto Indonesia membuka jalur perdamaian dengan cara membangun

³⁴*Politik Luar Negeri Republik Indonesia*. (1987). Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, hal 22

hubungan yang baik dengan negara tetangga seperti Malaysia. Hal ini kemudian yang memperlihatkan adanya perbedaan kebijakan politik luar negeri orde lama dan orde baru. Keseriusan Indonesia dalam menciptakan kawasan yang aman dan damai kemudian dilanjutkan oleh Soeharto dengan memprakarsai *Association South East Asia Nations* (ASEAN).

ASEAN resmi didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok setelah lima negara yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina dan Singapura yang di wakili oleh masing-masing menteri luar negerinya dalam Deklarasi Bangkok. Dibentuknya ASEAN disebabkan oleh adanya gejolak persaingan dua blok besar antara Amerika Serikat (Barat) dan Uni Soviet (Timur) dan dinamika kawasan di masing-masing negara di kawasan Asia Tenggara yang mengawatirkan. Maka dari itu ASEAN di deklarasikan sebagai harapan baru bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Adapun isi dalam deklarasi Bangkok pada saat itu, sebagai berikut:

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta perkembangan kebudayaan di kawasan Asia tenggara.
2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional.
3. Meningkatkan kerja sama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi.
4. Memelihara kerja sama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada.

5. Meningkatkan kerja sama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara.³⁵

Dengan keberhasilan pembentukan ASEAN ini secara langsung memberikan dampak yang baik dalam normalisasi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia pada saat itu. Karena kedua negara ini masuk ke dalam struktur ASEAN.

Kerjasama ASEAN ini dianggap hal yang diharuskan untuk menciptakan stabilitas kawasan yang mana nantinya hal tersebut akan kembali lagi pada keamanan negara-negara di Asia Tenggara. Era Soeharto mengklaim bahwa Indonesia merupakan pemimpin di ASEAN.³⁶ Mengingat Indonesia merupakan negara paling besar di kawasan. Selain itu, setelah Indonesia berhasil mengupayakan dalam mengembalikan citra serta hubungan baik dengan negara barat, maka kekuatan Indonesia semakin di akui oleh negara lain. Hal tersebut terlihat ketika menentukan suatu kesepakatan terkait dengan pertahanan sementara dari pangkalan militer asing di wilayah regional yang dimasukkan ke dalam deklarasi ASEAN.³⁷ Hal tersebut dilatar belakangi karena Indonesia selalu menganggap bahwa militer asing dapat menjadi sebuah ancaman bagi keamanan kawasan khususnya bagi Indonesia sendiri.

³⁵ASEAN Selayang Pandang, (2012). Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja sama ASEAN, hal 2.

³⁶Soesastro, H. (2016). ASEAN during the crisis. *ASEAN Economic Bulletin*, Vol. 15, No. 3, hal 373-381.

³⁷ Suryadinata, L. (1998). *Politik Luar Negeri Soeharto di Bawah Soeharto*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES, hal 85 dalam Michael leifer indonesia's foreign policy, hal 122

Cita-cita untuk menciptakan keseimbangan politik luar negeri yang di arahkan pada upaya perdamaian dunia, kemudian ASEAN pun diharapkan dapat menjadi salah satu motor untuk terciptanya perdamaian kawasan sebagaimana yang tertera pada poin 2 dalam isi Deklarasi Bangkok.

Peralihan dalam menentukan hubungan luar negeri di bawah Soeharto diawali ketika buruknya hubungan Indonesia dengan blok Timur yang cenderung komunis setelah peristiwa G-30S/PKI, yang mana hal tersebut menjadikan blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat sebagai pilihan alternatif yang strategis dalam menjalankan aktivitas politik luar negeri. Kurun waktu sebelum pemilu tahun 1982 menjadikan pembangunan ekonomi sebagai poin pokok. Maka dari itu dengan adanya persetujuan dari negara-negara barat atas pembentukan *the Inter Governmental Group for Indonesia* (IGGI) pada saat Konferensi Paris.³⁸ Hal itu dibentuk sebagai alat peminjaman bantuan bagi perekonomian Indonesia pada saat itu.

Keputusan untuk mendekati diri dengan pihak barat terlihat sukses. Dalih kesamaan ideologi anti komunis merupakan faktor penting dalam eratnya hubungan Indonesia-Barat. Akan tetapi hal tersebut menjadi salah satu hal yang dapat membutuhkan kelompok barat terhadap stabilitas politik dalam negeri Indonesia. bukan lagi menjadi rahasia umum bahwa politik dalam negeri era Soeharto mengalami kecacatan. Dari mulai krisis ekonomi yang tak kunjung

³⁸ Ganewati Wuryandari, D. M, op.cit., hal 120.

membalik, serta intervensi militer terhadap aktivitas politik sampai dengan represifitas terhadap masyarakat sipil.

Peristiwa Timor Timur merupakan salah satu contoh kecacatan politik dalam negeri Indonesia yang dapat mengundang perhatian dunia. Peristiwa konflik Timor Timur ini sebenarnya sudah mulai menagrah pada genosida disebabkan adanya kependudukan ilegal Indonesia pada tahun 1976. Dalam kurun waktu 1980-1990an dinamika konflik Timtim ini cenderung pada pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh militer Indonesia terhadap masyarakat setempat. Bagaimana tidak, tindak pembunuhan, pemerkosaan, dan juga penganiayaan terjadi secara massal di Timor Timur. Tentu peristiwa ini mendapat perlawanan dari masyarakat Timtim, bahkan ada tiga kelompok yaitu East Timor Action Network (ETAN), gereja Katolik, dan Pretilin yang berjuang untuk menginternasionalisasi pelanggaran yang telah dilakukan oleh tentara Indonesia di Timor Timur. Atas upaya tersebut, kemudian PBB memutuskan akan mengirimkan perwakiannya ke Indonesia untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Adapun efek dari persoalan HAM di Timor Timur menyebabkan terjadinya tekanan yang muncul dari dunia internasional terhadap Indonesia tanpa terkucali IGGI yang menjadi salah satu kendaraan pinjaman Indonesia yang pada akhirnya berujung pada pembubaran IGGI.

B. Politik Luar Negeri Indonesia dan Dunia Islam

Dalam sejarah, pada rentan waktu abad ke 13 sampai abad 16 islam datang ke Indonesia dengan dibuktikan adanya kerajaan islam di Nusantara.³⁹ Di dalam buku Rizal Sukma disebutkan bahwa islam datang ke Indonesia melalui perdagangan oleh pedagang dan pelancong dari tiga tempat yang berbeda dengan waktu yang berbeda. Hal tersebut dibuktikan oleh para pelancong yang menemukan islam di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Tome Pires dari Afghanistan yang berkunjung ke Pasai pada abad 16.⁴⁰ Pada awal kedatangan Islam di Indonesia, Islam merupakan agama premature yang muncul di wilayah Indonesia di bagian timur dan tengah pulau Jawa yang notabene wilayah padat penduduk, islam hanyalah ditempatkan sebagai agama yang disandarkan pada nilai-nilai animisme Jawa dan Hindu-Budha.⁴¹

Berbeda dengan hari ini, Islam telah berkembang pesat di Indonesia sehingga dapat dikatakan bahwa Islam sebagai agama yang di peluk, diakui oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Dengan presentase kurang lebih 90% dari jumlah penduduk, menjadikan Islam berpengaruh besar dalam aktivitas baik dalam segi pengambilan keputusan maupun perjuangan di Indonesia. Islam muncul sebagai agama mayoritas di Indonesia itu disebabkan oleh adanya pengaruh kaum elite atau kerajaan islam pada saat itu dalam memperluas ajaran islam di wilayahnya seperti Samudera Pasai. Kemudian adanya peran dari umat

³⁹Rizal Sukma, (2003). *Islam In Indonesian Foreign Policy*. London: Routledge Curzon.
Hal 10

⁴⁰Ibid, hal 11

⁴¹Michael Leifer. (1986). *Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia. hal 72

muslim pribumi dan luar negeri yang juga melakukan upaya dalam perluasan pengaruh ajaran Islam baik melalui dakwah, guru ataupun berdagang.

Pada era Soekarno, Indonesia sempat menyematkan syariat Islam ke dalam kenegaraan pada saat Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 disebutkan dalam sila pertama yang berbunyi **Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.**⁴² Akan tetapi kemudian Soekarno memiliki formula dengan merubah sila pertama menjadi ketuhanan yang maha Esa atas pertimbangan keberagaman budaya, etnis, dan agama demi kesatuan bangsa yang satu.

Sejak awal mula kedatangan Islam, Indonesia dan Islam memiliki keeratan yang harmonis karena Islam masuk ke Indonesia melalui cara yang damai. Kemudian corak Islam tumbuh pada praktik politik Indonesia, bagaimana tidak mayoritas para pejuang bangsa saat itu beragama Islam. Salah satunya Bung Hatta sang pemikir prinsip politik luar negeri bebas dan aktif untuk Indonesia. Selain itu berdirinya dua organisasi besar Islam yaitu Muhammadiyah dan NU, menambah warna akan pengaruh Islam dalam perpolitikan Indonesia, baik politik dalam negeri ataupun politik luar negeri.

Dalam praktik politik dalam negeri Soekarno, pada tahun 1957 Islam berpotensi memiliki *power* yang lebih karena dianggap sebagai kekuatan besar untuk menyebarkan paham demokrasi sebelum peran tersebut diambil alih oleh PKI dan militer. Dalam politik luar negeri, Indonesia mengaplikasikan sesuai pada

⁴² Ibid, hal 78

prinsipnya bebas dan aktif. Bebas dan aktif ini memiliki tiga fitur yaitu kemerdekaan, antikolonialisme, dan pragmatis.⁴³ Maka dari itu, islam dalam politik luar negeri tidak memiliki tempat secara formal. Meskipun demikian, islam memiliki pengaruh dan peran dalam penentuan terhadap politik luar negeri Indonesia pada era Soekarno seperti hubungan Indonesia dengan negara Timur Tengah dan islam juga berperan dalam pembentukan identitas Indonesia di dunia internasional yang dikenal sebagai negara besar islam.

Pada era kepemimpinan Soeharto, perpolitikan memiliki perubahan konsentrasi yang di fokuskan pada pembangunan ekonomi dan peran kepemimpinan di kawasan. Pada awal kepemimpinan, islam memiliki peran penting pada politik domestik yang tergabung aliansi militer untuk meruntuhkan PKI.

Berbicara dunia islam, maka tidak akan luput perhatian pada Timur Tengah. Menurut sejarah, Timur Tengah memandang bahwa Indonesia merupakan teman strategis dan juga memiliki hubungan yang dekat dalam konteks agama ataupun budaya. *Eventhough Indonesia's relations with Middle East are anchored in strong historical and cultural roots, in its development especially in term of economics and political Indonesia appeared to move away from the region.*⁴⁴ Kedekatan tersebut terbukti ketika negara Arab menjadi salah satu negara awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia.

⁴³ Rizal Sukma, op.cit., hal 32

⁴⁴ Rizal Sukma, op.cit., hal 46

Kesadaran Indonesia dalam pentingnya berperan dalam dunia islam diaplikasikan Indonesia dalam menanggapi isu-isu islam di ranah internasional. Hal tersebut terbukti pada beberapa isu dunia islam seperti isu Rohingya di Myanmar. Dalam isu ini Indonesia mengambil keputusan untuk membantu Rohingya agar bisa tinggal di wilayah Indonesia karena Rohingya mendapatkan penindasan dari pemerintah Myanmar yang memaksa mereka untuk pergi mengamankan diri. Kemudian dengan label pelopor Konferensi Asia-Afrika, Indonesia mendukung Palestina untuk kemerdekaan Palestina dari gempuran Israel serta mengirimkan bantuan logistic untuk kebutuhan masyarakat di jalur Gaza.

Dalam upaya unjuk taring di dunia internasional, Indonesia pun tidak berhenti pada tingkat kawasan saja. Pada tahun 1969 Indonesia secara resmi bergabung ke dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) menjadi salah satu negara anggota. Bergabungnya Indonesia ke dalam OKI ini tidak lepas dari kondisi mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Hal itu pun kemudian menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang dipertimbangkan di dalam OKI. Keikutsertaan Indonesia dalam OKI tentu tidak hanya berlandaskan jumlah penduduk saja, akan tetapi ini merupakan sebagai salah satu upaya lanjutan Indonesia di era Soeharto untuk menangani permasalahan yang muncul di dunia.

Sejak awal OKI memiliki cita-cita untuk melibatkan diri dalam menciptakan perdamaian dunia, khususnya dunia islam. Hal tersebut terbukti ketika OKI terlibat dalam konflik separatisme Mindanao sebagai fasilitator.

Dalam konflik Mindanao banyak terjadi penyiksaan yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap umat minoritas muslim di wilayah Filipina Selatan oleh pemerintah Filipina. maka dari itu Indonesia melalui OKI ikut berperan aktif sebagai aktor ketiga dalam upaya perdamaian di Mindanao.

Jika melihat fenomena diatas maka dapat kita katakan bahwa meskipun islam tidak memiliki tempat yang formal dalam prinsip politik luar negeri Indonesia, akan tetapi islam di Indonesia mampu memberikan pengaruh yang besar terhadap dinamika serta arah politik luar negeri. Kita bisa melihat di mana islam menjadi salah satu kekuatan besar bagi Indonesia disebabkan islam menjadi agama mayoritas, yang kemudian hal ini dibawa menjadi faktor sekunder dalam penentuan kebijakan luar negeri. Meskipun Indonesia beragama mayoritas Islam, akan tetapi Indonesia tidak mendikte sebagai negara islam. Indonesia tetap pada prinsipnya sebagai negara kesatuan yang bertuhan. Dengan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif.

Peran penting yang diberikan islam oleh islam, dapat mempengaruhi pada politik luar negeri Indonesia. dalam ranah internasional perpaduan politik luar negeri dan islam mampu bersuara cukup besar, seperti terjalinnya hubungan Indonesia dengan Timur Tengah, keterlibatan Indonesia pada isu-isu islam di kawasan (Moro dan Rohingya), islam membentuk identitas negara di dunia internasional yang kemudian Indonesia dikenal sebagai negara islam terbesar,

kebijakan untuk memberikan dukungan terhadap Palestina, dan juga keterlibatan Indonesia dalam *International Muslim Solidarity*.⁴⁵

⁴⁵ Michael Leifer, *loc.cit.*